

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMIDAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH) PERIODE TAHUN 2015-2019**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA**

STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
SITI ROBIAH
NIM 17108010058**

DOSEN PEMBIMBING:

LAILATIS SYARIFAH., MA

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Robiah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Siti Robiah

NIM : 17108010058

Judul : "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) Periode Tahun 2015-2019"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan, Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Pembimbing



Lailatis Syarifah, M.A.
NIP. 19820709 201503 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-789/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH) PERIODE TAHUN 2015-2019.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ROBIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17108010058
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Lailatis Syarifah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 610cd00ebd6d1



Penguji I

Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
SIGNED

Valid ID: 611353e2b2e0b



Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6122f6a13f870



Yogyakarta, 02 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6123276284b33

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Robiah

NIM: 17108010058

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2015-2019" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi karya tulis orang lain kecuali pada bagian yang dikutip dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya pelanggaran karya tulis ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat agar dapat dimaklumi

Yogyakarta, 28 Mei 2021



Siti Robiah (17108010058)

MOTTO

“Kerja keras adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah keberhasilan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi saya ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Abah Ahmad Rofi'i dan Ibu Eli Setyowati, yang senantiasa mendukung dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang. Teruntuk Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah, Kakak-kakak dan adik-adik saya tercinta, saudara dan teman seperjuangan saya, baik di pondok maupun di kampus, serta Tim KKN 102 Pemalang yang telah berjuang bersama saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas *Rahman* dan *Rahimnya* serta nikmat yang dilimpahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) Periode Tahun 2015-2019”, Sholawat Nabi semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rosulullah SAW.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan Strata 1/Sarjana Progam Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses menyusun skripsi ini, tentunya banyak pihak yang terlibat untuk membantu dan mengarahkan penyusun. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Qayyum, SEI, MSc.Fin., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lailatis Syarifah, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajari dan memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan berlangsung.
6. Kedua orang tua, kakak, adik, keluarga dan teman-teman seperjuangan selama di kampus maupun di pondok yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Semoga segala kebaikan yang dilakukan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT, serta semoga karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat secara luas.

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Siti Robiah

(17108010058)



DAFTAR ISI

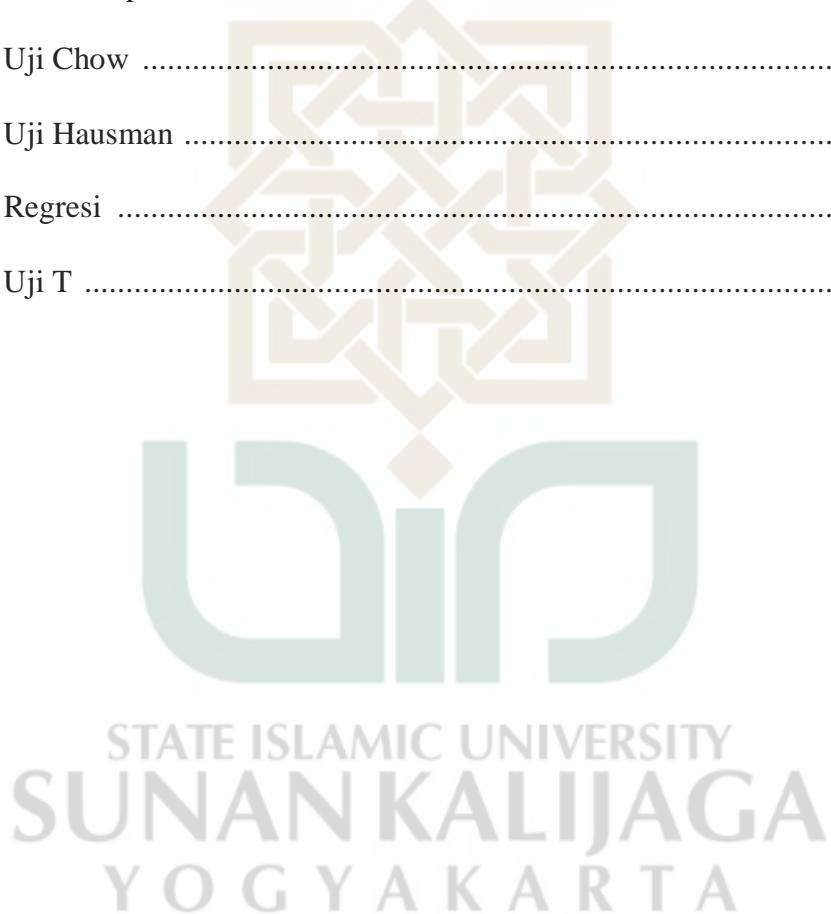
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Desentralisasi Fiskal	9

1. Teori Desentralisasi Fiskal	9
2. Indikator Desentralisasi Fiskal	10
3. Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	11
4. Desentralisasi Fiskal Dalam Perspektif Islam	11
5. Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	13
6. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	17
7. Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	19
8. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.....	19
 B. Telaah Pustaka	20
C. Pengembangan Hipotesis	30
D. Kerangka Pemikiran.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	35
D. Metode Analisis Penelitian	36
 BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Objek Penelitian	39
1. Gambaran Umum dan Kondisi Geografis	39
2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	41
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	42

4. Dana Bagi Hasil (DBH)	43
5. Dana Alokasi Umum (DAU)	44
6. Dana Alokasi Khusus (DAK)	44
B. Analisis Statistik Deskriptif.....	45
C. Metode Analisis Penelitian.....	47
1. Uji Spesifikasi Model	47
2. Regresi Data Panel.....	49
3.Uji Signifikansi Koefisien Regresi	50
D. Pembahasan	52
1. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Parsial.	52
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan.	58
3. Desentralisasi Fiskal Dalam Perspektif Islam	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2 Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Menurut Permen No.119/PMK.07/2017	44
Tabel 3 Statistik Deskriptif Penelitian	48
Tabel 4 Hasil Uji Chow	50
Tabel 5 Hasil Uji Hausman	51
Tabel 6 Hasil Regresi	52
Tabel 7 Hasil Uji T	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	4
Gambar 2 Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	5
Gambar 3 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4 Peta Provinsi Jawa Tengah	42
Gambar 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	43
Gambar 6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	45
Gambar 7 Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Tengah	57
Gambar 8 Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Tengah	59
Gambar 9 Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah	60



ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat daerah merupakan salah satu tujuan dari penyelenggaran pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satunya adalah dengan penetapan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) Periode Tahun 2015-2019”, memiliki tujuan untuk mengetahui dampak transfer pemerintah berupa DBH, DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial dan simultan.

Data penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Metode penelitian ini adalah regresi linear data panel dengan model *Fixed Effect*. Variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel independennya DBH, DAU dan DAK. Adapun analisis data menggunakan software Stata 13, dengan uji spesifikasi model, regresi data panel, dan uji signifikansi koefisien regresi.

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan Stata 13 diperoleh hasil bahwa secara simultan variabel independen DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Secara parsial variabel DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah periode tahun 2015-2019.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

ABSTRACT

The welfare of the local community is one of the goals of government administration. To achieve this goal, various efforts have been made by the government to improve people's living standards, one of which is the establishment of a fiscal decentralization policy. The research entitled "Analysis of the Effect of Fiscal Decentralization on Regional Economic Growth (Case Study of Districts/Cities in Central Java Province) Period 2015-2019", has the aim of knowing the impact of government transfers in the form of Tax Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds non Economic Growth partially and simultaneously .

The research data is secondary data sourced from the Central Java Provincial BPS and the Central Java Provincial Government Financial Statistics Publication 2015-2019. This research method is linear regression of panel data with Fixed Effect model. The dependent variable is economic growth and the independent variables are Tax Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds.. The data analysis used Stata 13 software, with model specification test, panel data regression, and regression coefficient significance test.

Based on the results of panel data regression with Stata 13, the results show that simultaneously the independent variables Tax Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds. have an effect on the dependent variable of economic growth. Partially, the Tax Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds. Variables have a positive effect on regional economic growth for the 2015-2019 period.

Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Tax Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah yang besar terbagi menjadi daerah-daerah, di mana daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat beragam dilihat dari berbagai sudut seperti letak demografi, potensi alam, kehidupan ekonomi masyarakatnya, serta struktur dan kebijakan di masing-masing daerah. Dengan adanya perbedaan-perbedaan antar daerah tersebut menjadikan pola pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi tidak sama. Menurut Hidayat (2016) Pemerintah pusat sebagai sentral dari pemerintahan daerah membentuk suatu kebijakan sebagai alternatif, solusi dan jawaban dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, yakni berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pelimpahan wewenang tersebut memiliki tujuan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya sehingga suatu daerah akan mandiri secara finansial. Oleh sebab itu dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi, pemerintah berharap desentralisasi dapat menjadi formula terbaik untuk meningkatkan ketahanan fiskal dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Indonesia telah melakukan transformasi tata pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dengan transisi pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 secara otomatis terjadi pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah-daerah atau disebut pemerintahan tingkat II, dalam hal ini pemerintah pusat berharap kesejahteraan masyarakat lokal dapat meningkat melalui pemberlakuan otonomi daerah atau penerapan kebijakan desentralisasi fiskal.

Menurut penelitian Rizqiandri (2019)di Indonesia kebijakan Desentralisasi Fiskal sudah berjalan selama dua dekade. Pelaksanaan kebijakan Desentralisasi Fiskal ini sesuai dengan Undang-undang No:23 tahun 2004yang mengatur tentang tata pelaksanaan Pemerintahan daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang diatur dalam Undang-undang No;25 tahun 1999 yang mengatur mengenai Perimbangan keuangan, antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Namun, pada 1 Januari 2002 Undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-undang No:32 tahun 2004. Dengan disahkannya Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Pemerintah daerah yang kemudian menerima pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat berhak atas daerahnya untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut penelitian Rizqiandri (2019)menyatakan dibandingkan dengan resikonya penyelenggaraan desentralisasi lebih dominan kepada manfaat dan nilai positifnya. Salah satu keunggulan dari penyelenggaraan desentralisasi ini pemerintah pusat akan lebih bisa membaca dan memahami preferensi dari masing-masing daerah yang berbeda-beda. Sehingga arah kebijakan dapat tepat sasaran mengenai kebutuhan masyarakat daerah, dalam hal ini perlunya kompromi dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam rangka pengambilan keputusan arah kebijakan yang sesuai dan efisien. Meninjau secara jangka panjang, sistem desentralisasi fiskal tidak hanya untuk memenuhi preferensi masyarakat pada masa sekarang, akan tetapi pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan yang lebih jelas dan terperinci juga akan melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Selain itu, sistem ini juga menjadi alternatif untuk mencegah utang daerah yang berlebihan untuk kepentingan belanja publik. Di sisi lain pelaksanaan sistem desentralisasi secara tidak langsung menciptakan kompetisi antar daerah, di mana daerah dengan pendapatan daerah

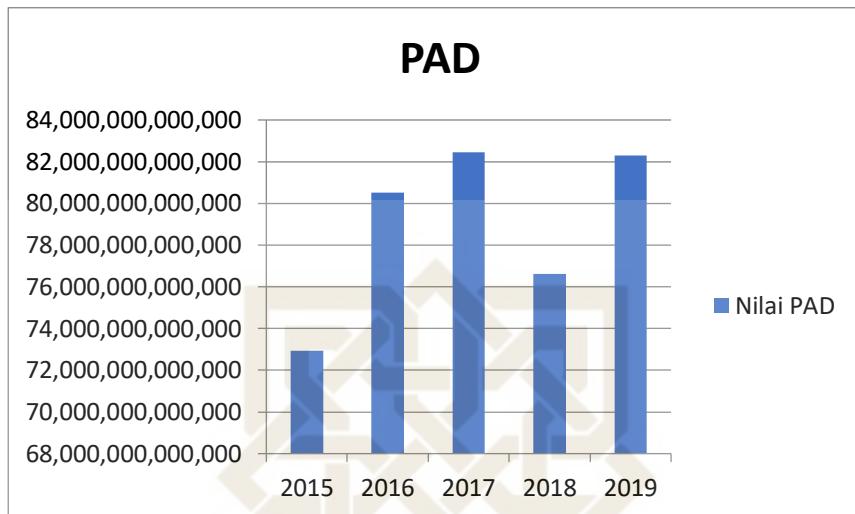
yang tinggi tentunya akan menarik para investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut, di mana modal yang besar suatu daerah dapat menunjang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan dan memberikan penegasan bahwasanya pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana perimbangan yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Putro (2016) menyatakan Penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat sifatnya adalah unconditional grant atau block grant yang diartikan tidak adanya syarat dalam pengalokasian dana perimbangan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengalokasian dana tersebut secara kondisional. Sebagai instrumen pendapatan daerah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tentunya dapat dijadikan peluang suatu daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Akan tetapi implementasi penyelenggaraan desentralisasi fiskal yang optimal tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan daerah, juga dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah yang diharapkan mengarah pada kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah? Untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam realisasi pendapatan daerah termasuk dana perimbangan meliputi DBH, DAU, dan DAK sebagai salah satu poin yang masuk ke dalam realisasi pendapatan daerah. Berikut data mengenai realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (Dalam Satuan Rupiah).



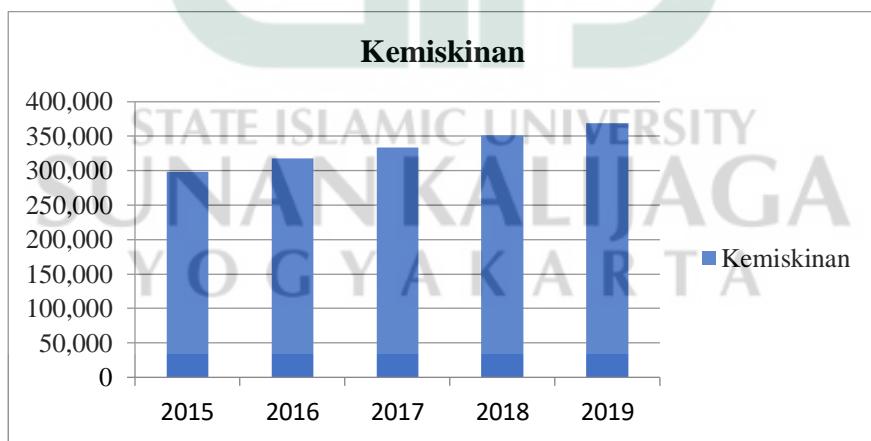
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah.

Menurut data Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2015 realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp.72.929.222.488.000,00. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp.80.510.004.351.000,00. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp.82.460.035.621.000,00. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp.76.605.675.602.000,00 dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp.82.295.324.061.000,00. Selama periode tahun 2015-2019 realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan pendapatan hanya terjadi pada tahun 2017 menuju 2018. Dengan adanya kenaikan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya relasi yg positif dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pendapatan daerah.

Dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2019, realisasi pendapatan daerah Dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah meningkat. Tujuan dari penerapan kebijakan desentralisasi itu sendiri adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peningkatan pendapatan daerah Dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah yang cukup signifikan, tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, hal ini terbukti dengan meninjau data mengenai kemiskinan di Dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2019 yang terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat grafik). Sehingga muncul pertanyaan apakah dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah dengan transfer pemerintah berupa DBH, DAU, dan DAK tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Gambar 2

Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian dan penelaahan data di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Karena desentralisasi sebagai

alternatif pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah, desentralisasi dengan banyak nilai positifnya, namun dalam pengimplementasiannya di Provinsi Jawa tengah setelah diberlakukannya kebijakan ini angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah meningkat. Sehingga dengan melihat fenomena ini, peneliti tertarikuntuk mengkaji, mengapa yang terjadi secara riilnya demikian atau tidak sesuai dengan tujuan dari desentralisasi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tahun 2015–2019?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019

4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai bentuk pembelajaran, menambah wawasan dan pengalaman, serta sebagai sarana untuk terus belajar serta melatih dan mengetahui tata cara penulisan suatu karya ilmiah yang baik dan benar sehingga dapat dijadikan bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat.

- b. Manfaat Bagi Masyarakat dan Pemerintah Secara Luas

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi masyarakat untuk mengetahui gambaran Desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk meningkatkan partisipasinya agar pertumbuhan ekonomi di daerahnya meningkat. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan penentu arah kebijakan yang harus ditetapkan.

- c. Manfaat Bagi Akademisi/Peneliti Selanjutnya

Manfaat bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk menulis karya ilmiah yang lebih baik lagi.

E. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab yang disusun secara sistematis dalam penelitian ini, berikut uraiannya

Pada BAB 1 adalah pendahuluan, pada BAB ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian di mana dalam pendahuluan menjelaskan tentang dampak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi,

pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di provinsi jawa tengah. dilanjutkan pembahasan mengenai rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai problematika yang akan diselesaikan, tujuan penelitian, yakni mengenai tujuan penelitian, serta manfaat penelitian bagi Mahasiswa/i, bagi para akademisi maupun instansi pendidikan, serta masyarakat secara luas.

Pada BAB II Menjelaskan tentang landasan teori, variabel-variabel penelitian yang digunakan, tabel telaah pustaka yang berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis yang menggambarkan anggapan dasar hasil penelitian yang akan dilakukan, dan peta konsep kerangka pemikiran yang menunjukan mengenai batasan dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.

Pada BAB III Membahas mengenai metode penelitian meliputi analisis yang digunakan dalam penelitian, uji-uji validasi data yang akan dilakukan, deskripsi operasional variabel-variabel penelitian (terdapat tiga poin penting, yakni indikator, sumber data dan alat ukur pada masingmasing variabel penelitian). Menjelaskan tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada BAB IV Membahas tentang hasil analisis yang dilakukan, menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal (*Dependent Variable*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan Daerah (*Independent Variable*).

Pada BAB V Merupakan penutup dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator PDRB daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen DBH, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi (PE), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Menurut teori Adam Smith untuk membangun suatu daerah modal memegang peran penting untuk mewujudkan suatu pembangunan. Daerah mendapatkan modal bersumber dari PAD, realisasi dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK), pinjaman daerah, hibah, dan sumber-sumber lain yang sah. DBH sebagai salah satu poin yang berkontribusi dalam menyumbangkan modal, diketahui data realisasi DBH Pajak Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2015-2019. Pada periode tahun 2015 sampai 2019 realisasi alokasi DBH selalu mengalami kenaikan. ini menjadi salah satu faktor kemudian DBH memberikan pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Tengah.

2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Menurut Halim (2009) sebagaimana dikutip oleh Nisa (2017) pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dengan asumsi bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif

kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Sebagaimana yang diterapkan di Kota Salatiga, selama periode tahun 2015-2019 Kota Salatiga tercatat sebagai daerah yang menerima DAU paling rendah pada tahun 2015 sebesar 400.176.755,00, kemudian ada tahun selanjutnya 2016 Kota Salatiga menerima DAU lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 456.079.561 dan pertumbuhan ekonominya meningkat sebesar 1,61%.

3. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Menurut Yustika (2008) dalam bukunya yang berjudul “Desentralisasi Ekonomi di Indonesia, Kajian Teoritis dan Realitas Empiris”, menyebutkan bahwa salah satu cara agar tercapainya tujuan dari desentralisasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah. DAK yang diberikan oleh pemerintah diberdayakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang menunjang produktivitas, serta suatu kegiatan atau program yang beresentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga DAK dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Saran-saran

1. Setiap daerah di Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan pendapatan daerah baik dari pemungutan pajak daerah maupun hasil dari pengelolaan sumber daya alam daerah. Karena menurut data yang diperoleh peneliti yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah, Data mengenai pendapatan DBH Provinsi mengalami fluktuatif dan tidak ada peningkatan yang signifikan. Dengan mengoptimalkan

pajak daerah dan mengembangkan kekayaan daerah dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan DBH daerah dan Provinsi sehingga dapat menaikan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2. Masyarakat daerah perlu meningkat partisipasinya dalam mewujudkan program Pemerintah maupun segala bentuk kegiatan ekonomi yang menunjang produktivitas daerah.
3. Pemerintah perlu membuat program yang dirancang sedemikian rupa agar segala upaya program tersebut dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, mendengarkan preferensi dari masyarakat sebagai pertimbangan penentu arah kebijakan yang bertujuan untuk kemakmuran daerah, serta penyampaian informasi yang transparan.
4. Transfer pemerintah tidak sekedar penyerahan dana kepada daerah, tetapi juga harus disertai dengan tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah dalam mewujudkan tujuan desentralisasi yaitu pemakmuran dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Pemerintah perlu menetapkan standarisasi pencapaian suatu daerah, sehingga masing-masing daerah akan berupaya mencapai standar yang ditentukan sebagai konsekuensi dari penerimaan dana perimbangan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Altito, Siagian. (2010). “*Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)*”: Skripsi, Universitas Diponegoro.

Arsyad, Lincoln. (2010), “*Ekonomi Pembangunan*”, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Aulia, Nely.(2014). “*Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*”: Semarang, Jurnal, Universitas Negeri Semarang.

Fathurrahman,Ayief. (2012). “*Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan*”: Yogyakarta, Jurnal Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Hari, Priyo.(2005). “*Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)* ”: Jurnal, Universitas Kristen Satya Wacana.

[http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/23899/5/.](http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/23899/5/)

<http://www.academia.edu/524078>, diakses pada 1 maret 2021.

<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index> DOI:...

Hidayat, Muhammad Noor.(2016). “*Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*” Malang: Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya.

<http://www.jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 21 Febuari 2020, 13.55.

Kalsum, Ummi.(2018). “*Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*”, Kendari: Jurnal Lii Falah IAIN Kendari.

Lintantia F.A, Miyasto. (2013). “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*”: Jurnal, Universitas Diponegoro.

Muttaqin, Rizal. (2018). “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective”, Bandung: Jurnal Unma.

Ni'matul,Husna. (2018). “*Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam dan Konvensional*”, Ponorogo: Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Nurhemi, Guruh S. (2013). “*Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Daerah di Indonesia*”: Jurnal Bank Indonesia.

Prasetyo Putro, Riski. (2016). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatra”: Jurnal, Indonesian Treasury Review.

Purwanto, Antonius. (2020). “*Kondisi Geografi, Pemerintahan, Kependudukan, dan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah*”: Sumber : Kompaspedi.com.

Rizqiandri, Muhammad. 2019 “*Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2018*”, Lampung: Skripsi, Universitas Lampung Bandar.

Sasana, Hadi. (2006). “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”: Jurnal, Dinamika Pembangunan.

Setianingrum,Any. (2013). “*Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam*”, Jakarta: Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Az Zahra Jakarta.

Singgih, Santoso. (2005), “*Mengatasi Berbagai Masalah Dengan SPSS*”, Jakarta: Gramedia.

Sujarweni, Wiratna. (2015), “*SPSS untuk Penelitian*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Todaro, Michale P. (2004), "Pembangunan Ekonomi", Jakarta: Erlangga.

Waluyo, Joko.(2007). "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia", Yogyakarta: Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Www.Sipuu.Setkab.Go.Id , Diakses Pada Tanggal 1 maret 2021

